

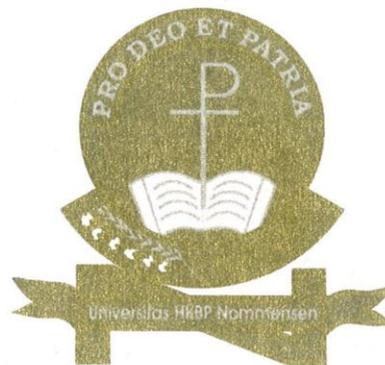
SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI
SIMALUNGUN NOMOR 31 TAHUN 2023 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BPBD SIMALUNGUN BIDANG
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI**

OLEH :

ANDES MUKLAS PURBA

NPM : 20230043



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN**

MEDAN

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan dan diperbanyak oleh :

Nama : Andes Muklas Purba
Npm : 20230043
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja BPBD Kabupaten Simalungun Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi.

Telah diterima dan terdaftar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas HKBP Nommensen Medan.

Dengan demikian skripsi ini telah dilengkapi dengan syarat-syarat akademis untuk menempuh ujian skripsi untuk menyelesaikan studi.

SARJANA ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STRATA SATU (S1) PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

Pembimbing I

Dra.L.Primawati Degodona, MSP

Pembimbing II

Vera A.R. Pasaribu, S.Sos., MSP

Ketua Program Studi

Dra. Artha Lumban Tobing, MSP

Dekan



Drs. Nalom Siagian, MM

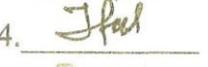
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN MEDAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEDAN - INDONESIA

Panitia Ujian Sarjana Administrasi Publik Program Strata Satu (S-1)
Terakreditasi B Berdasarkan SK BAN-PT No. 4402/SK/BAN-PT/Ak-
PNB/S/VII/2022. Menyatakan Bahwa :

Nama : Andes Muklas Purba
NPM : 20230043
Program Studi : Administrasi Publik

Telah Mengikuti Ujian Skripsi dan Lisan Komprehensif Sarjana Ilmu
Sosial Dan Politik Program Studi Administrasi Publik Program Strata Satu (S-1).
Pada Hari Rabu, 29 Agustus 2024 Dinyatakan LULUS.

1. Ketua : Dr.Drs.Johnson Pasaribu,MSi
2. Sekretaris : Dra.L.Primawati Degodona, MSP
3. Penguji Utama : DraArtha Lumban Tobing, MSP
4. Anggota Penguji : Jonson Rajagukguk,S.Sos.,SE.,MAP
5. Pembimbing Utama :Dra.L.Primawati Degodona, MSP

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Diketahui

Dekan



Dr. Drs. Nalom Siagian, MM

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Andes Muklas Purba
Npm : 20230043
Program Studi : Administrasi Publik
Pembimbing I : Dra.L.Primawati Degodona, MSP
Pembimbing II : Vera A.R. Pasaribu, S.Sos., MSP
Judul : Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja BPBD Simalungun Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi.

Tanggal	Berita Acara	Paraf	Dosen
14/03/2024	ACC Judul Skripsi		Dra. Artha Lumban Tobing, MSP
6/05/2024	ACC Proposal Pembimbing I		Dra.L.Primawati Degodona, MSP
6/05/2024	ACC Proposal Pembimbing II		Vera A. Pasaribu, S.Sos.,MSP
10/09/2024	ACC Skripsi Pembimbing I		Dra.L.Primawati Degodona, MSP
10/09/2024	ACC Skripsi Pembimbing II		Vera A. Pasaribu, S.Sos.,MSP
10/09/2024	ACC Abstrak		Drs.L.Primawati Degodona,MSP
26/09/2024	ACC Periksa Buku		Dra. Artha Lumban Tobing, MSP
01/10/2024	Skripsi Diterima Oleh Dekan		Dr. Drs. Nalom Siagian, MM

Medan, Oktober 2024

Diketahui:

Mahasiswa

Ketua Program Studi

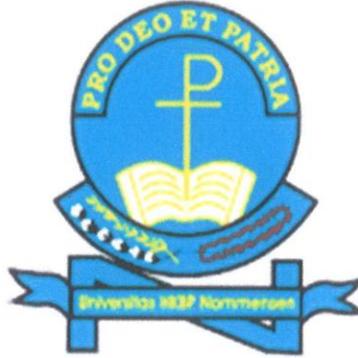
Dekan


Andes Muklas Purba


Dra. Artha Lumban Tobing, MSP



Dr. Drs. Nalom Siagian, MM



LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja BPBD Kabupaten Simalungun Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi”** adalah benar hasil karya saya sendiri dan judul yang dimaksud belum pernah dimuat, dipublikasikan atau diteliti oleh mahasiswa lain dalam konteks penulisan Skripsi Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas HKBP Nommensen Medan. Semua sumber data dan informasi yang diperoleh telah dinyatakan jelas dan benar apa adanya. Apabila kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh pihak Universitas HKBP Nommensen Medan.

Medan, September 2024
Penulis



Andes Muklas Purba
20230043

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja BPBD Simalungun Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dimana terdapat keterbatasan sumberdaya di BPBD Simalungun khususnya sumberdaya manusia dan sarana/prasarana. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif bersifat deskripsi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Pelaksana BPBD Simalungun dan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Simalungun.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya upaya penanggulangan bencana di Simalungun belum seperti yang diharapkan karena faktor keterbatasan sumberdaya, baik sumberdaya manusia beserta sarana/prasarana, terutama di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi walaupun dengan sumber daya yang ada saat ini sudah bekerja maksimal. Penyebab keterbatasan tersebut karena susah mencari dan merekrut personel, dimana yang dibutuhkan tidak hanya soal kemampuan tetapi juga komitmen yang tinggi terhadap pekerjaan. Keterbatasan sarana dan prasarana tergantung pada penganggaran daerah dan postur APBD nya yang belum memadai untuk mengidealkan kondisi BPBD Simalungun.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Sumberdaya

ABSTRACT

This research discusses the implementation of the Simalungun Regent's Regulation Number 31 of 2023 concerning Position, Organizational Structure, Duties and Functions and Work Procedures of the Simalungun BPBD in the field of rehabilitation and reconstruction. Where there are limited resources at the Simalungun BPBD, especially human resources and facilities/infrastructure. The type of research used is descriptive qualitative research. The informants in this research are the Chief Executive of the Simalungun BPBD and the Head of the Rehabilitation and Reconstruction Division of the Simalungun BPBD.

The results of this research show that disaster management efforts in Simalungun have not been as expected due to limited resources, both human resources and facilities/infrastructure, especially in the Rehabilitation and Reconstruction Sector even though the existing resources are currently working optimally. The cause of these limitations is because of the difficulty. looking for and recruiting personnel, where what is needed is not only ability but also high commitment to the work. Limited facilities and infrastructure depend on regional budgeting and the posture of the APBD which is not yet adequate to idealize the conditions of the Simalungun BPBD.

Keywords: Implementation, Resorce, Policy

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Tuhan maha kasih yang telah memberikan Rahmat dan TuntunanNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja BPBD Kabupaten Simalungun Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi”**

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, teristimewa kepada orangtua saya,Bapak Wilson Purba dan Ibu Marsauli Sipayung yang selalu menjadi penyemangat penulis, yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang, doa dan motivasi dengan penuh kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis. Terimakasih selalu berjuang untuk penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. Richard Napitupulu, ST., MT selaku Rektor Universitas HKBP Nommensen Medan.
2. Bapak Dr. Drs. Nalom Siagian, MM selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas HKBP Nommensen Medan.

3. Ibu Dra.L.Primawati Degodona, MSP selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan dukungan, arahan, bimbingan, serta semangat dalam menyusun penulisan skripsi ini, sehingga dapat selesai dengan baik.
4. Ibu Vera A.R Pasaribu, S.Sos.,MSP selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan dukungan, arahan, bimbingan, serta semangat dalam menyusun penulisan skripsi ini, sehingga dapat selesai dengan baik.
5. Ibu Dra.Artha Lumban Tobing, MSP selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu penulis melalui saran dan kritik yang diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Jonson Rajagukguk, S.Sos.,SE.,MAP selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis melalui saran dan kritik yang diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas HKBP Nommensen Medan yang telah membagi ilmu pengetahuan yang akan bermanfaat bagi saya.
8. Teruntuk saudara/i kandung saya, Terimakasih sudah ikut serta dalam proses menempuh pendidikan selama ini, atas support moral maupun materi kepada penulis dan selalu memberikan yang terbaik untuk keperluan penulis. Terima kasih atas semangat, doa dan cinta kasih yang diberikan kepada penulis.

9. Terimakasih kepada seluruh teman seperjuangan yang telah menjadi saudara selama mengikuti perkuliahan sampai pada akhir penulisan skripsi.

10. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati dan sikap terbuka menerima masukan-masukan berharga demi kesempurnaan dan dapat bermanfaat skripsi ini bagi para pembaca.

Medan, September 2024

Penulis

Andes Muklas Purba

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Penjelasan Kebijakan Publik.....	5
2.2 Implementasi Kebijakan Publik.....	8
2.2.1 Komunikasi	9
2.2.2 Sumber Daya.....	10
2.2.3 Disposisi.....	12
2.2.4 Struktur Birokrasi.....	13
2.3 Organisasi.....	14
2.4 Penelitian Terdahulu	18

2.5 Kerangka Berfikir	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
3.1 Jenis Penelitian.....	28
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	29
3.2.1 Lokasi Penelitian	29
3.2.2 Waktu Penelitian	29
3.3 Informan Penelitian.....	30
3.4 Teknik Pengumpulan Data	30
3.5 Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	34
4.1.1 Kabupaten Simalungun	34
4.1.2 BPBD Kabupaten Simalungun.....	36
4.2 Hasil Penelitian	44
BAB V PENUTUP	56
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran.....	57
Daftar Pustaka	58
Daftar Rujukan	59

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 4.1 Data Peralatan BPBD Kabupaten Simalungun.....	43

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Model Implementasi George C Edward III	9
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir.....	26
Gambar 3.1 Teknik Analisis Data.....	33
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Simalungun.....	34
Gambar 4.2 Strutur Organisasi BPBD Simalungun	37
Gambar 4.4 Mekanisme Alur Pengaduan BPBD Simalungun	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki berbagai macam potensi terjadinya bencana, karena secara geografis sebagian besar wilayah Indonesia berada pada kawasan rawan bencana, seperti gempa bumi, longsor, erupsi gunung berapi, dan bencana-bencana yang bersifat kekinian. Bencana menimbulkan dampak serius yang merugikan pada masyarakat. Adapun kerugian yang sering dialami adalah kerugian materi seperti tempat tinggal, mata pencaharian bahkan tidak jarang pula adanya korban jiwa, serta terhentinya aktivitas masyarakat luas. Bencana harus cepat diatasi dalam hal ini rehabilitasi dan rekonstruksi guna memulihkan kondisi dan aktivitas masyarakat kembali normal. Maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Pemerintah Kabupaten Simalungun pada tahun 2010 membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simalungun yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simalungun, kemudian digantikan dengan yang terbaru yaitu Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simalungun dengan pertimbangan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan

pelayanan publik sehingga perlu dilakukan restrukturisasi organisasi dan reformasi birokrasi.

Daerah Kabupaten Simalungun tidak terlepas dari berbagai kejadian bencana baik bencana alam maupun non alam, yang dapat terjadi kapan saja tanpa dapat diprediksi. Menurut pandangan peneliti yang dalam hal ini sebagai masyarakat Kabupaten Simalungun, upaya penanggulangan bencana oleh BPBD Simalungun selama ini belum mampu mencapai sesuai dengan yang diharapkan berdasarkan regulasi yang berlaku, dimana penyebabnya adalah keterbatasan sumberdaya dalam hal ini jumlah personel dan sarana/prasarana yang belum memadai. Hal tersebut juga dibuktikan melalui data yang diperoleh sebelumnya dari BPBD Simalungun bahwasanya kondisi sumberdaya yang dimiliki baik itu sumberdaya manusia maupun sarana/prasarana belum mencukupi sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Simalungun yang terdiri dari 32 kecamatan.

Kemudian berdasarkan tugas dan fungsi BPBD bidang rehabilitasi dan rekonstruksi serta pertimbangan yang termuat didalam undang-undang pembentukannya yaitu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif serta efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik sehingga dilakukan restrukturisasi organisasi dan reformasi birokrasi, maka penulis menganggap perlunya dilakukan penelitian mengenai implementasi kebijakan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simalungun yang dituangkan kedalam skripsi berjudul :

“Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja BPBD Kabupaten Simalungun Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas maka peneliti merumuskan masalah yang menjadi kajian pokok dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

- a) Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja BPBD Simalungun bidang rehabilitasi dan rekonstruksi?
- b) Apa faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja BPBD Simalungun bidang rehabilitasi dan rekonstruksi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui implementasi kebijakan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja BPBD Simalungun Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- b) Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat implementasi kebijakan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja BPBD Simalungun Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

1.4 Manfaat Penelitian

- a) Bagi Peneliti
Penelitian ini dapat menjadi sarana pembelajaran dan pengaplikasian teori-teori yang sudah dipelajari pada saat perkuliahan.
- b) Bagi Akademisi
Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pihak yang ingin mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja BPBD Simalungun Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- c) Bagi Masyarakat
Penelitian ini dapat menjadi informasi tambahan bagi masyarakat dan bermanfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk saran

kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun dalam penanggulangan bencana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan instrument pemerintahan yang tidak hanya menyangkut tentang aparatur negara, tetapi juga terkait dengan *governance* yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Kebijakan merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara tidak langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara.

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam prakteknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada

pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach dalam Leo Agustino (2012), yaitu :

“Adalah cukup untuk membuat sebuah program atau kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya menenangkan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk yang mereka anggap klien”

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya *Implementation and Public Policy* dalam Leo Agustino (2013) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai :

“Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berupa perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/atau sasaran yang hendak dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.”

Kemudian pengertian implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dalam Leo Agustino (2013) adalah :

“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.”

Berdasarkan beberapa defenisi yang disampaikan para ahli diatas, disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil

yang sesuai dengan tujuan atau saran dari kebijakan itu sendiri. Hal ini sesuai pula dengan yang diungkapkan oleh Lester dan Stewart Jr. dalam Leo Agustino (2013) dimana mereka mengatakan bahwa :

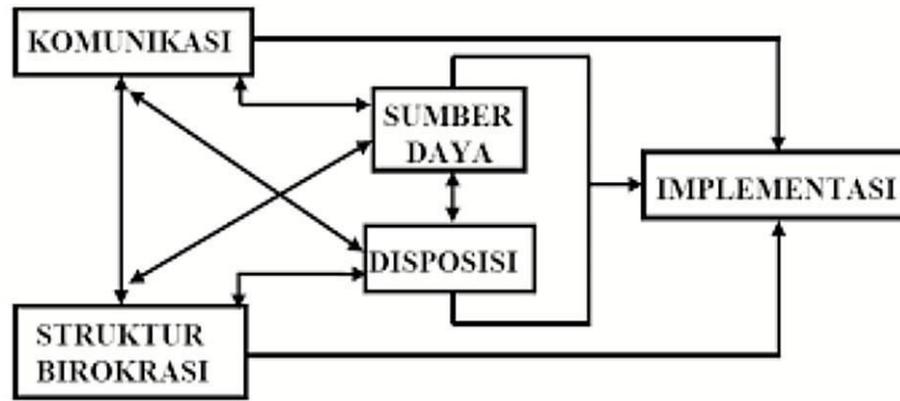
“Implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (output). Keberhasilan dari suatu implementasi dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian hasil akhir (output).”

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Edward III dalam Leo Agustino (2013) merumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumberdaya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.

Ditegaskan Edward III dalam Leo Agustino (2012) bahwa masalah utama dari administrasi publik adalah *lack attention to implementation* bahwa *without effective implementation the decision of policymaker will not be carried out successfully*. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada ornganisai atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggapan dari para pihak yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.

Gambar 2.1 Model Implementasi George C Edward III



Sumber : Leo Agustino, (2013) .Dasar-Dasar Kebijakan Publik

2.2.1 Komunikasi

Keberhasilan kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila sasaran dan tujuan suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Edward dalam Leo Agutino (2012) mengemukakan terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variable komunikasi tersebut yaitu :

- a) Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.
- b) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-byreaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu.
- c) Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk diterapkan dan dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan pelaksana dilapangan.

2.2.2 Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsistensi, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yaitu kompetensi implementator, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya akan tinggal dikertas menjadi dokumen saja.

Menurut Edward III dalam Leo Agustino (2013) sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang

digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari :

- a) Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level byreucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan *implementor* saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan suatu kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.
- b) Informasi, dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu : pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- c) Wewenang, pada umumnya wewenang harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika kewenangan tidak ada maka kekuatan para implementor dimata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika kewenangan formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas

kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan ; tetapi disisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang dilselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingan sendiri atau kelompoknya.

- d) Fasilitas, fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

2.2.3 Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor mempunyai disposisi yang baik, maka ia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan pembuat kebijakan. Ketika implementor mempunyai sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi juga menjadi tidak efektif.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Leo Agustino (2013) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari :

- a) Pengangkatan birokrasi, disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu pemilihan dan pengangkatan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada

kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan masyarakat.

- b) Insentif, merupakan salah satu tehnik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

2.2.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures*) atau SOP. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Dijelaskan Edwad III dalam Leo Agustino (2013) secara singkat bahwa pedoman yang tidak akurat, jelas atau konsisten akan memberikan kesempatan kepada *implementors* membuat diskresi. Diskresi ini bisa langsung dilaksanakan

atau dengan jalan membuat petunjuk lebih lanjut yang ditujukan kepada pelaksana tingkat bawahnya. Jika komunikasi tidak baik maka diskresi ini akan memunculkan disposisi. Namun komunikasi yang terlampaui detail akan mempengaruhi moral dan independensi implementor, bergesernya tujuan dan pemborosan sumber daya seperti keterampilan, kreatifitas dan kemampuan adaptasi. Sumber daya saling berkaitan dengan komunikasi dan mempengaruhi disposisi dalam implementasi. Demikian juga disposisi dari implementor akan mempengaruhi bagaimana mereka menginterpretasikan komunikasi kebijakan baik dalam menerima maupun mengelaborasi lebih lanjut kebawah rantai komando.

2.3 Organisasi

Elu dan Purwanto (2011) berpendapat bahwa organisasi merupakan :

- a) Alat untuk mencapai tujuan
- b) Alat untuk mengoordinasikan sumber daya
- c) Memiliki batas yang relative dapat diidentifikasi
- d) Sebagai system sosial sehingga dapat berperilaku
- e) Dikoordinasikan secara sadar
- f) Melibatkan lebih dari satu orang

Pertumbuhan dan perkembangan organisasi semakin luas dan kompleks. Dilahirkannya pertumbuhan organisasi baru, fluktuasi keanggotaan dan perubahan teknologi pendukung kegiatan sebagai respon terhadap inovasi baru untuk memenuhi kebutuhan dalam hal ini di Kabupaten Simalungun dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simalungun.

Terdapat beberapa variabel yang merupakan variable pilihan yang menentukan perubahan organisasi yaitu ;

a) *Labour Turnover*, merupakan proses pergantian tenaga kerja yang sering dipakai sebagai variabel tak bebas. Kondisi ini menggambarkan proporsi karyawan yang meninggalkan pekerjaan dalam satu tahun (argyle,Gardner dan Cioffi dalam Liliweri.1997). Labour turnover merupakan variabel yang mudah sekali diukur misalnya dengan menghitung karyawan yang pensiun, meninggal dunia, pindah tugas (rotasi dan mutasi),cuti dan karyawan yang beristirahat.

b) Konflik Organisasi

1. Konflik dalam organisasi

Yang dimaksud dengan konflik dalam organisasi adalah konflik yang terjadi dalam tubuh organisasi,yang mana sumber konflik adalah memburuknya hubungan antarpribadi diantara karyawan dalam satuan kerja yang sama atau berbeda dalam sistem organisasi.

2. Konflik antar organisasi

Yang dimaksud dengan konflik antar organisasi adalah konflik yang terjadi diantara organisasi-oranisasi yang berbeda.

c) Kelenturan Organisasi

Porte dan Denhart dalam Liliweri (1997) mengemukakan bahwa :

“Derajat kelenturan atau fleksibilitas organisasi dapat digambarkan dengan proses penyesuaian organisasi terhadap perubahan-perubahan dalam organisasi.”

Salah satu kesukaran dalam menentukan kelenturan organisasi adalah sejauh mana koordinasi diantara satuan kerja dalam organisasi sehingga dapat bertahan dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang datang dari luar. Oleh karena itu akibat adanya kelenturan itu sendiri maka setiap organisasi harus memiliki *strong point* agar dia dapat bertahan terhadap perubahan yang melandanya.

d) Pertumbuhan Organisasi

Haire dalam Liliweri (1997) mengartikan pertumbuhan organisasi sebagai penambahan jumlah karyawan dalam satuan waktu atau periode waktu tertentu. Pertumbuhan organisasi seringkali dikaitkan dengan meningkatnya jaringan komunikasi, pengembangan departemen dan spesialisasi pekerjaan, peningkatan kontrak dengan organisasi secara simbolis, pertukaran hubungan dan perluasan sebagian produk baru ke pasar bahkan kepertambahan kekayaan.

e) Suksesi Administratif

Suksesi administratif merupakan tingkat pergantian diantara para pimpinan administratif dalam suatu organisasi. Carlson dalam Liliweri (1997) mengemukakan suksesi administratif tidak bisa ditolak, oleh karena itu semua organisasi harus sepakat dan mendukung suksesi atau pergantian

para pemegang kunci penting yang berkaitan dengan perkembangan organisasi.

f) Penggunaan Alat Teknologi Termasuk Otomatisasi

Sejak teknologi hadir dalam sebuah organisasi, apapun nama teknologi itu (otomatisasi atau mekanisasi) maka peneliti mulai melihatnya sebagai variabel yang sangat mempengaruhi proses dan struktur organisasi khususnya dan perubahan keadaan sosial pada umumnya. Sejumlah kecil penelitian-penelitian pada kondisi tertentu telah menemukan bahwa pengaruh teknologi sangat besar terhadap perubahan cara kerja organisasi, misalnya : (1) ada hubungan nyata antara teknologi dengan hasil yang diperoleh, (2) terdapat perbedaan implikasi dari beragam teknologi terhadap cara kerja karyawan dalam beragam bidang kegiatan, (3) ada banyak kemungkinan kaitan antara perubahan teknologi dengan perubahan struktur organisasi yang meliputi perubahan atas hirarki kewenangan, rentang kendali, kejelasan dan ketegasan tugas, dan (4) tidak ada satu teori umum tentang perubahan-perubahan teknologi yang bisa bertahan, kalau ada jumlah itu dapat dihitung dalam organisasi, karena ada banyak ragam variabel yang berpengaruh terhadap perubahan organisasi.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk membandingkan penelitian yang kita lakukan dan selanjutnya menemukan inspirasi baru. Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan implementasi kebijakan Peraturan Bupati Simalungun No. 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja BPBD Simalungun Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis & Tahun	Hasil Penelitian
1	Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kajian Di Desa Tuana Tuha Kenohan)	Ali Akbar, Sundoyo 2022	Pada saat terjadinya bencana, serangkaian kegiatan penanganan darurat telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat dan pihak lainnya. Seluruh tindakan yang dilakukan membantu masyarakat terdampak agar tidak lebih menderita. Sesuai dengan siklus penanggulangan bencana, maka setelah berakhirnya masa penanganan darurat harus segera dilaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana, sehingga pertolongan terhadap masyarakat yang terdampak bencana dapat berkesinambungan.

2	<p>Problematika Rehabilitasi dan Rekonstruksi Studi Kasus Pasca Bencana Tsunami Mentawai 2010</p>	<p>Lidya Christin Sinaga 2013</p>	<p>Apa yang dialami Mentawai dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksinya sebenarnya menggambarkan kondisi di mana koordinasi lintas sektoral masih sulit dilakukan. Negosiasi yang terjadi seringkali sangat birokratis, padahal persoalan bencana haruslah diletakkan dalam kerangka persoalan kemanusiaan, karena kita berbicara dalam konteks korban bencana. Dua tahun membiarkan masyarakat korban tsunami tinggal di hunian sementara yang tidak layak jelas merupakan persoalan kemanusiaan baru yang harusnya bisa menjadi prinsip utama dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Indonesia.</p>
3	<p>Implementasi Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pulang Pisau</p>	<p>Wiranto,Raimona Sadelman Tulis 2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komunikasi, BPBD Kabupaten Pulang Pisau sudah melakukan komunikasi secara langsung dengan pihak masyarakat maupun pemerintah kabupaten dalam penyampaian informasi kebencanaan. ▪ Sumber Daya, Jumlah sumber daya manusia yang terbatas, ketersediaan jumlah satuan tugas masih belum memadai dan

			<p>kurang, serta Sumber daya pelengkap seperti pralatan yang digunakan oleh BPBD masih belum lengkap sehingga membuat kinerja dari BPBD menjadi kurang maksimal.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Disposisi, BPBD sudah melaksanakan komitmen dengan beberapa satuan tugas lainnya dalam mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana di lapangan. Pemberian insentif juga dilakukan dalam menjalankan Implementasi ini, sehingga ketertarikan pegawai dalam menjalankan tugas tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan tugas dengan baik. ▪ Struktur Birokrasi, BPBD Kabupaten Pulang Pisau telah memiliki aturan yang jelas tentang penanganan bencana aturan tersebut sudah sesuai dengan isi Perbup No.59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan
--	--	--	---

			Bencana Daerah Kabupaten Pulang Pisau. Dimana wewenang, tugas dan fungsi serta tata kerja BPBD Kabupaten Pulang Pisau sudah diatur.
4	Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi di Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah	Putri Cep Alam, Herbasuki Nurcahyanto, Susi Sulandari	Bencana Erupsi Merapi yang mengakibatkan Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten berdampak cukup serius menarik perhatian banyak pihak untuk ikut serta memberikan bantuan yang tetap harus di koordinasi oleh instansi yang bertanggung jawab dengan penanganan bencana yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten. Dalam kegiatan pasca bencana tersebut yang dikenal dengan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah bantuan di sektor perumahan, infrastruktur, sosial dan ekonomi. Namun belum semuanya maksimal, sebagian bukan seperti yang diharapkan dan sebagian lagi belum disentuh.
5	Efektivitas Peran BPBD Dalam Upaya Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Masyarakat Pasca Bencana	Wahyu Rizana , Zikri Alhadi 2021	Berdasarkan hasil temuan yang telah dibahas dalam pembahasan bahwa Efektivitas peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam dalam upaya rehabilitasi

	<p>Banjir Di Nagari Tanjung Sani Kabupaten Agam</p>		<p>dan rekonstruksi rumah masyarakat pada saat setelah terjadi bencana banjir di Jorong Galapung Nagari Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi rumah masyarakat yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Agam sudah efektif, hal tersebut dapat diketahui dari faktor pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi yang dilakukan oleh BPBD pada proses pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah masyarakat. Yang pertama adalah dari segi pencapaian tujuan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Agam dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah masyarakat berjalan dengan baik. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Agam telah melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap 14 rumah masyarakat yang terdampak bencana banjir dengan tindakan rehabilitasi sebanyak 9 rumah dan rekonstruksi sebanyak 5 rumah. Dimana BPBD Kabupaten Agam melakukan perbaikan rumah masyarakat yang mengalami kerusakan ringan, sedang maupun kerusakan berat. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan dengan cepat serta sesuai atau cocok</p>
--	---	--	---

			dengan batas waktu yang sudah ditetapkan, untuk rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD melakukannya dalam jangka waktu kurang lebih 12 bulan. Selanjutnya yang kedua adalah integrasi BPBD Kabupaten Agam dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah masyarakat.
--	--	--	---

Dalam penelitian Ali Akbar,Sundoyo (2022) yang berjudul “Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kajian Di Desa Tuana Tuha Kenohan)” meneliti tentang apa saja yang dibutuhkan dan yang harus dilakukan BPBD Kutai Kertanegara pasca bencana rehabilitasi dan rekonstruksi).

Dalam penelitian Lidya Christin Sinaga (2013) yang berjudul “Problematika Rehabilitasi dan Rekonstruksi Studi Kasus Pasca Bencana Tsunami Mentawai 2010” meneliti tentang masalah dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pada korban bencana tsunami Mentawai 2010 bahwasanya masih koordinasi lintas sektoral masih sulit dilakukan serta negosiasi yang terlalu birokratis hingga mengabaikan prinsip rekonstruksi dan rehabilitasi yang berdasarkan urusan kemanusiaan.

Dalam penelitian Wiranto,Raimona Sadelman Tulis (2023) yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pulang Pisau” meneliti tentang implementasi kebijakan dilihat dari empat faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi

Dalam penelitian Putri Cep Alam, Herbasuki Nurcahyanto, Susi Sulandari yang berjudul “Upaya Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi di Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah” meneliti tentang upaya yang dilakukan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pada korban bencana erupsi gunung Merapi di kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten oleh berbagai pihak dan BPBD Kabupaten Klaten sebagai instansi yang membidangi penanggulangan bencana

Dalam penelitian Wahyu Rizana, Zikri Alhadi (2021) yang berjudul “Efektivitas Peran BPBD Dalam Upaya Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Masyarakat Pasca Bencana Banjir Di Nagari Tanjung Sani Kabupaten Agam” meneliti tentang efektivitas peran BPBD dalam rehabilitasi dan rekonstruksi rumah masyarakat pasca bencana banjir di Nagari Tanjung Sani Kabupaten Agam.

Sedangkan penelitian ini meneliti dan melihat bagaimana implementasi peraturan bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja BPBD Simalungun bidang rehabilitasi dan rekonstruksi serta lebih fokus melihat dari faktor sumber daya, dikarenakan masalah-masalah penanggulangan bencana di Simalungun yang dapat dikatakan belum optimal disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya baik sumberdaya manusia dan sarana/prasarana.

2.5 Kerangka Berfikir

Kabupaten Simalungun telah berdiri sejak tahun 1956, dan tidak lepas dari terjadinya bencana baik alam maupun non alam maupun karena kesalahan manusia, hanya saja bencana tersebut tidak semuanya tercatat dengan spesifik sejak Kabupaten Simalungun berdiri.

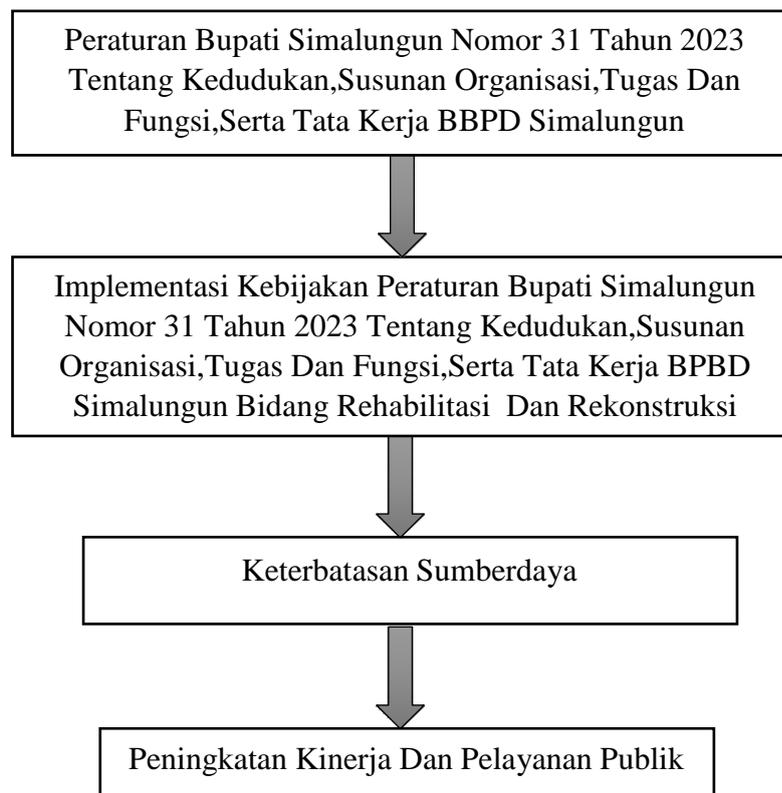
Kemudian hingga pada saat ini upaya penanggulangan bencana melalui lembaga yang ada yaitu BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta, Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simalungun atas perubahan dari Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simalungun, Kabupaten Simalungun masih mengalami kesulitan yang disebabkan berbagai faktor, salah satunya keterbatasan sumberdaya (dalam hal ini sumber daya manusia dan sarana/prasarana). Hal tersebut juga dapat diamati dilapangan bahwasanya setiap bencana-bencana yang terjadi di Kabupaten Simalungun penanggulangannya belum seperti yang diharapkan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, sebagaimana peneliti juga telah melakukan observasi awal sebelumnya, maka peneliti berasumsi bahwa implementasi Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simalungun (bidang rehabilitasi dan rekonstruksi) belum optimal.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati dan mendeskripsikan implementasi kebijakan penanggulangan bencana bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada kantor BPBD Kabupaten Simalungun berdasarkan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 tahun 2023. Peneliti akan menguraikan tentang kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja badan penanggulangan bencana yaitu mengatasi masalah bencana.

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir



Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan pada dasarnya secara sengaja melakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model implementasi Kebijakan George C. Edward III mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik. Adapun dalam peniliannya mengacu pada empat variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrat.

Hasil yang diharapkan dengan penilaian teori tersebut terhadap masalah dalam penelitian ini adalah BPBD Kabupaten Simalungun mampu meningkatkan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana (bidang rehabilitasi dan rekonstruksi) dengan lebih baik lagi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan pada suatu proses, artinya peneliti bermaksud untuk menemukan, memahami, menjelaskan fenomena yang terjadi” (Moleong, 2010). Pendekatan tersebut digunakan dengan pertimbangan :

1. Penelitian kualitatif menyajikan bentuk holistik (menyeluruh) dalam menganalisa suatu fenomena.
2. Penelitian jenis ini lebih peka menangkap informasi kualitatif deskriptif dengan secara relatif tetap berusaha mempertahankan keutuhan dari objek, artinya data yang dikumpulkan dalam rangka studi kasus dipelajari sebagai keseluruhan yang terintegrasi (Esterberg, 2002).

Alasan penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini karena akan tergambar secara jelas dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menggunakan jenis penelitian deskriptif dimana penelitian ini hanya ingin menggambarkan keadaan, fakta, dan data nyata yang sedang terjadi pada saat sekarang. Kemudian peneliti mendeskripsikan permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi tersebut. Adapun penelitian ini difokuskan pada proses deskripsi dan perspektif pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Simalungun bidang rehabilitasi dan rekonstruksi dalam peningkatan kinerja dan pelayanan

publik berdasarkan yang termuat didalam Perbup Simalungun Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja BPBD Kabupaten Simalungun.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Lokasi penelitian ini diadakan di Kantor BPBD Kabupaten Simalungun yang beralamat di Jl.Jhon Horailam, Bahopal Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Alasan peneliti memilih tempat ini adalah karena merupakan pusat/sumber utama untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan tentang BPBD Kabupaten Simalungun.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 Tahun 2023 Dalam Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Publik Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pada Kantor BPBD Kabupaten Simalungun” tersebut akan dilakukan dalam rentang waktu 6 bulan,yakni dimulai dari bulan Mei 2024 hingga September 2024.

3.3 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang memahami informasi objek penelitian dan dapat memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada peneliti. Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini yaitu :

- a) Informan Kunci, ialah mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Pelaksana BPBD Simalungun
- b) Informan Utama, ialah mereka yang terlibat langsung dalam interaksi social yang diteliti. Adapun informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Simalungun.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data-data penelitian ini diperoleh dari beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti. Adapun teknik pengumpulam data pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Data primer, merupakan data yang diperoleh dari objek penelitian. Dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari melalui wawancara. Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara berhubungan dengan responden.

- b) Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan atau data yang sudah tersedia untuk peneliti yang diperoleh melalui media perantara yang dapat diperoleh melalui dokumentasi. Dokumentasi merupakan kegiatan mengumpulkan data berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data diterapkan pada saat proses pengumpulan data dan setelah pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu.

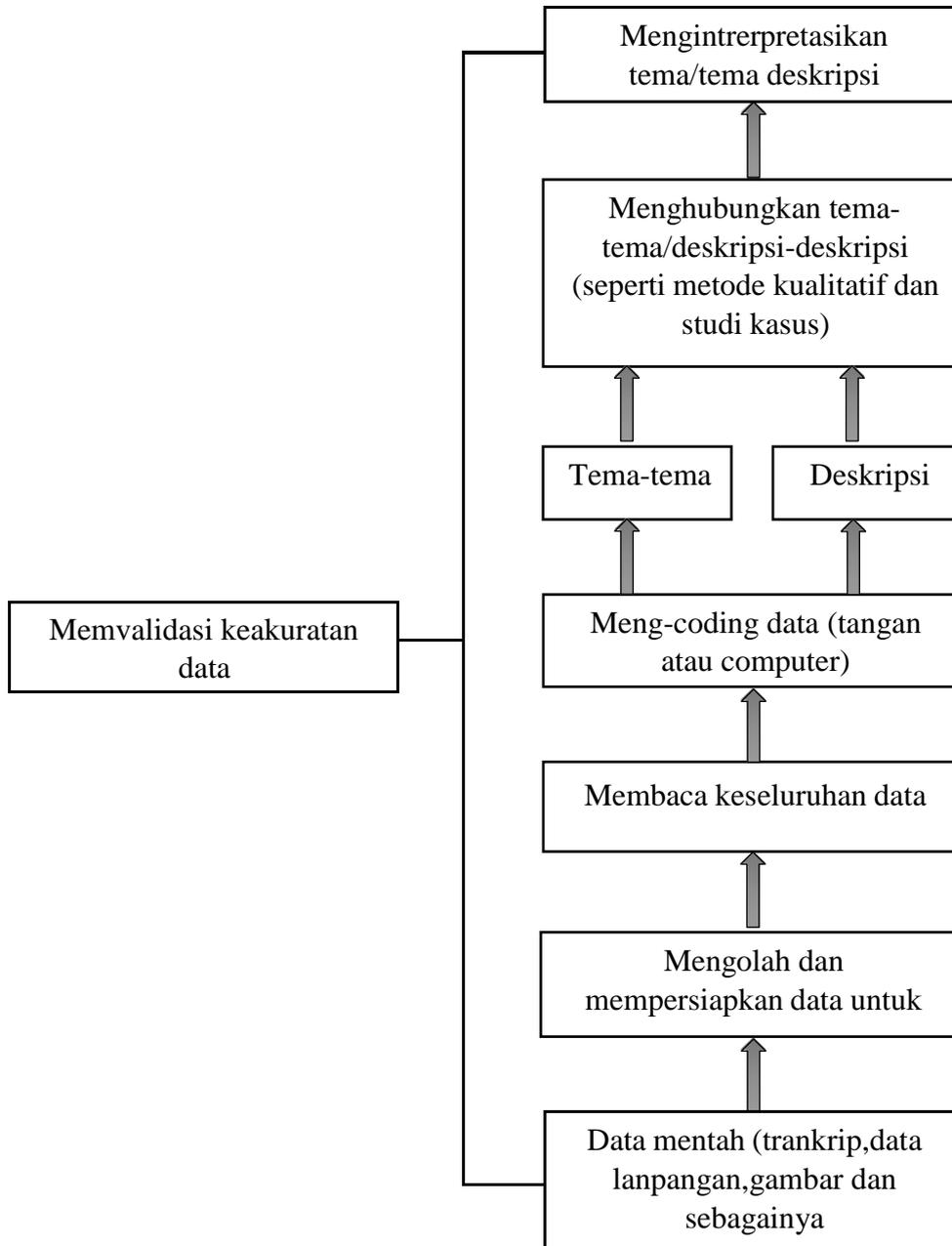
Analisis data adalah proses berkelanjutan yang memerlukan pemikiran terus-menerus tentang data, mengajukan pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang proses penelitian. Analisis data mencakup pengumpulan data terbuka dan didasarkan pada pertanyaan umum serta analisis informasi peserta. Analisis bukti (data) meliputi pemeriksaan klasifikasi, tabulasi, atau rekombinasi untuk mewakili proposal penelitian asli (John W.Creswell, 2016)

Teknik Analisis Data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kelola dan siapkan data untuk dianalisis. Fase ini meliputi perekaman wawancara dan digitalisasi dokumen, pengeditan data, serta pemilahan dan pengorganisasian data ke dalam berbagai kategori berdasarkan sumber informasi yang diperoleh.

2. Baca semua data. Langkah pertama adalah membentuk gambaran umum tentang informasi yang diperoleh dan memikirkan maknanya secara keseluruhan.
3. Analisis terperinci dengan meng-coding data. Pengkodean data adalah proses pengorganisasian dokumen/informasi ke dalam segmen teks sebelum diinterpretasikan. Langkah ini mencakup beberapa langkah pengambilan data tekstual atau visual yang dikumpulkan selama proses pengumpulan, segmentasi kalimat atau paragraf.
4. Menerapkan proses pengkodean. Untuk menggambarkan konteks, kategori, dan tema orang yang dianalisis. Dalam hal ini melibatkan upaya untuk menyampaikan informasi rinci tentang orang, tempat, dan peristiwa dalam konteks tertentu.
5. Menunjukkan cara menyatakan kembali deskripsi dan tema dalam pemberitaan naratif/kualitatif.
6. Langkah terakhir dalam analisis data adalah menafsirkan data atau memahami maknanya.

Gambar 3.1 Teknik Analisis Data



Sumber : Jhon Creswell,(2016:263)

